



Aksi Siswi Galang Dana Dijalan Untuk Bayar SPP

## Midji: Lebih Baik Sekolah di Daerah Masing-masing

Borneo Tribune, Pontianak  
Beberapa hari lalu, Pontianak digegerkan dengan aksi 2 siswa sekolah swasta yang menggalang dana untuk keperluan membayar SPP. Aksi tersebut dilakukan agar mereka dapat ikut ulangan di sekolah tersebut yang mengharuskan, setiap siswa bisa ikut ulangan bila sudah tidak ada tunggakan SPP.

Meski aksi tersebut menurut keduanya sebagai solusi untuk melanjutkan pendidikan, namun di mata Walikota Pontianak Sutarmidji, aksi nekat kedua siswa tersebut mencoreng nama baik Kota Pontianak.

Sutarmidji juga menyarankan, bila tidak ada sekolah yang dapat menampung kedua siswa tersebut. Midji menegaskan lebih baik mereka (2 siswa SMA Abdi Wacana) tersebut sekolah di daerah masing-masing.

"Lebih bagus kan sekolah di daerah masing-masing. Sama saja sebenarnya kualitas pendidikan itu di mana-mana," kata Midji.

Midji menjelaskan, sejauh ini Kota Pontianak sudah berusaha membangun pendidikan dengan baik, karena pemerintah tidak ingin usaha yang dilakukan ini tercoreng hanya karena kejadian tersebut.

Sutarmidji juga menjelaskan sekaligus menyesalkan atas aksi dua siswa sekolah swasta tersebut, Walikota Pontianak Sutarmidji menyesalkan adanya aksi serta memprotes sekolah agar tidak menghambat siswanya untuk ikut ulangan.

Selain itu, Sutarmidji juga menyayangkan aksi kedua siswi yang notabene berasal dari luar Kota Pontianak itu. Menurut Sutarmidji, sekolah seharusnya bisa lebih bijak, tidak boleh ada satu pun anak yang tidak diperbolehkan ikut ulangan umum hanya karena menunggak pembayaran iuran sekolahnya, baik itu swasta maupun negeri.

Aksi kedua siswa yang sempat terpublis di media di Kalbar tersebut, serta sempat ada tudingan kelalaian pemerintah menyikapi adanya siswa yang tidak mampu. Akan tetapi, Midji menegaskan Pemkot tidak berhak memberikan beasiswa kepada kedua siswi tersebut lantaran, kedua siswa yang melakukan aksi di jalan beberapa waktu lalu, bukan warga Kota Pontianak. Melainkan berasal dari luar daerah yang kebetulan mengenyam pendidikan di Kota Pontianak.

"Beasiswa itu tidak mungkin kita berikan karena memang aturannya tidak boleh. Bayangkan kalau semua orang dari luar Kota Pontianak bersekolah di sini dan kita beri beasiswa, itu tidak mungkin. Sedangkan anak Kota Pontianak saja yang tidak mampu belum tercover semuanya," jelasnya.

Penyaluran dana beasiswa dari APBD bukan semata-mata hanya untuk siswa kurang mampu, namun ada poin yang harus dilakukan yakni, ketentuan penyaluran beasiswa melalui APBD Kota Pontianak tersebut harus warga Kota Pontianak.

Midji juga membeberkan kejadian yang pernah me-

nyangkut aliran dana beasiswa tersebut. Beberapa waktu lalu, badan pemeriksa keuangan menemukan penyaluran dana yang salah. Sebuah sekolah swasta mencantumkan 80 persen siswa penerima beasiswa yang ternyata 80 persen berasal dari luar Pontianak. "Beasiswa yang berasal dari APBD itu hanya boleh diberikan kepada anak-anak Kota Pontianak, baik dia sekolah di Pontianak maupun luar Pontianak," ungkapnya.

Sebagaimana pengakuan kedua siswa tersebut, aksi yang mereka lakukan itu atas saran seseorang. Terungkapnya pengakuan ini, Sutarmidji mensinyalir, tidak menutup kemungkinan adanya saran atau suruhan kepada kedua siswi tersebut ditunggangi muatan politis.

Bahkan, diakuiinya masih ada sekolah negeri yang melakukan penahanan ijazah siswa lantaran terkendala persoalan biaya. Semestinya, sekolah tidak perlu melakukan hal tersebut karena menurutnya tindakan itu bisa menghambat kemajuan dunia pendidikan. "Ya sudahlah, diserahkan saja ijazah itu, anggap saja itu kontribusi sekolah untuk pencerdasan anak bangsa," ucap Midji.

Terkait tindakan seperti itu terutama di sekolah-sekolah negeri, Walikota mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang melakukan hal serupa. "Jangan korbakan anak didik karena mereka itu adalah harapan dan masa depan bangsa," pungkasnya. (Uby)